

ANALISIS PENAWARAN DAN PERMINTAAN KREDIT SERTA IDENTIFIKASI PELUANG EKSPANSI PEMBIAYAAN KREDIT SEKTORAL DI WILAYAH KERJA KBI MALANG

Ri'fat Pasha

Kantor Bank Indonesia Wilayah Malang
Jl. Merdeka Utara No.7 Malang

Abstract: *This research aimed to identify the factors of demand and banking loan offer in KBI Malang by using panel data. The estimation result showed that not optimal function of banking intermediacy in KBI Malang was caused more by the lack of demand for credit than credit crunch. While analysis using plot revealed credit worthiness had a conclusion that some certain sectors in KBI Malang tended to be unmarketable for credit/fund. On the contrary, in some sectors, there were potencies of credit/fund distribution. However, the research result was aggregate so it did not reflect the characteristic of bank condition precisely and economic condition individually.*

Key words: *supply and demand, credit sector, banking intermediacy*

Perbankan memiliki peran yang signifikan bagi aktivitas perekonomian suatu wilayah. Dalam kondisi wajar, bekerjanya fungsi perbankan secara optimal dapat menjadi *prompt indicator* yang paling mendekati dari aktivitas sektor riil. Hal demikian tentunya berlaku pula di daerah, termasuk di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Malang. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kinerja perbankan di wilayah kerja KBI Malang khususnya yang

berhubungan dengan kegiatan intermediasi perbankan berjalan kurang optimal. Dalam empat tahun terakhir tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tidak beranjak pada angka kurang dari 70%. Sementara dalam dua tahun terakhir pencapaian pertumbuhan kredit di wilayah kerja KBI Malang selalu berada di bawah target pertumbuhan kredit secara nasional yang ditetapkan sebesar 20% (Gambar 1).

Korespondensi dengan Penulis:

Ri'fat Pasha: Telp. +62 341 366 054, Fax.+62 341 324 820

E-mail: rpasha@bi.go.id



Sumber: Bank Indonesia, 2008.

Gambar 1. Penghimpunan Dana, Penyaluran Kredit, dan LDR di Wilayah Kerja KBI Malang

Menurut Agenor *et.al.* (2000), tidak berfungsinya intermediasi perbankan khususnya tentang tidak optimalnya penyaluran kredit dapat berasal dari faktor permintaan kredit atau faktor penawaran kredit. Sementara hasil temuan dari Harmanta dan Ekananda (2005) disimpulkan bahwa setelah periode krisis kondisi perbankan nasional mengalami *excess supply* kredit akibat lemahnya permintaan kredit. Sementara Sugema (2006), menyatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya kendala intermediasi perbankan adalah melambatnya kemajuan dunia usaha yang ditandai penurunan omset, kendala akses perbankan, serta ekspektasi dunia usaha terhadap perubahan fokus penyaluran kredit oleh perbankan yang terlihat dari masih tingginya *credit rationing* perbankan untuk sektor-sektor tertentu.

Sebagaimana diungkapkan dalam latar belakang paper ini, kinerja perbankan, dalam kondisi yang normal, merupakan *prompt indicator* yang relatif baik bagi perkembangan sektor riil. Namun demikian dalam beberapa kasus seringkali asumsi-asumsi ini tidak berlaku sepenuhnya dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi baik pada sektor riil itu sendiri maupun pada sektor perbankan. Dengan demikian perlu dikaji beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (a) Dari sisi demand atau suplai kredit yang

menyebabkan fungsi intermediasi tidak berjalan optimal; (b) Bagaimana distribusi sektoral perkreditan dibandingkan dengan karakteristik perekonomian serta potensi/hambatan ekspansi kredit sektoral. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor *demand* dan *supply* kredit yang menyebabkan penyaluran kepada sektor riil belum berjalan optimal. Penelitian akan dilakukan pada ruang lingkup penyaluran kredit oleh bank umum baik konvensional dan syariah serta penyaluran kredit BPR.

KREDIT DAN PEREKONOMIAN

Perbankan merupakan sub sistem keuangan yang paling dominan di Indonesia. Setidaknya sekitar 77% total pembiayaan sektor riil berasal dari kredit perbankan. Berbagai literatur mempelajari pentingnya peran lembaga perbankan telah ditemukan sejak tahun 1933 seperti Fisher (1933). Stiglitz dan Greenwald (2003) bahkan menyatakan bahwa perbankan lebih superior dibandingkan lembaga intermediasi lainnya terutama dalam mengatasi masalah *asymmetric information* dan mengatasi *transaction cost*.

PERBANKAN ■■■■■

Penelitian lain dilakukan oleh Mishkin (1978) dan Bernanke *et.al.* (1991) yang menyatakan bahwa kredit memiliki peran penting dalam menentukan output. Analisis Mishkin dan Bernanke ini sekaligus membantah hipotesis konvensional Friedman dan Schawartz (1966) yang menyatakan bahwa *money supply* memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan output. Hasil studi di Philipina oleh Lamberte (1999), dengan menggunakan metode *causality test*, menunjukkan bahwa peningkatan/penurunan tingkat pertumbuhan output akan menyebabkan peningkatan/penurunan kredit perbankan.

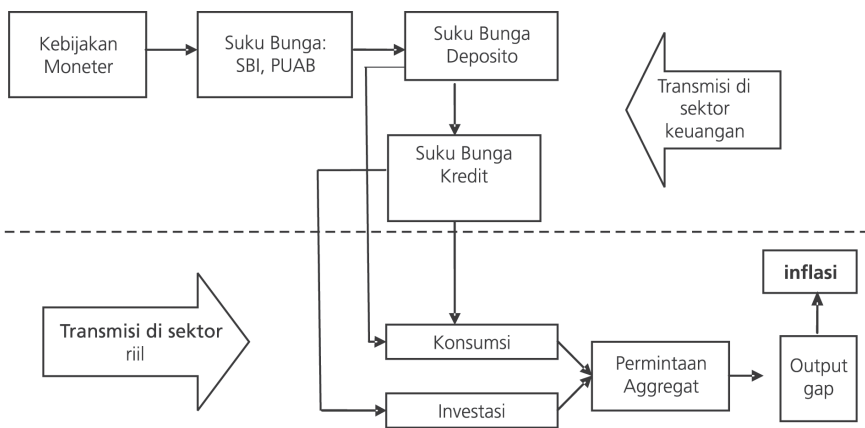
Transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit dapat dijelaskan bahwa tingkat bunga hasil dari penetapan kebijakan moneter akan mempengaruhi suku bunga di pasar kredit. Mekanisme ini menjadi penting karena beberapa alasan: Pertama, banyak bukti empiris menunjukkan bahwa perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan banyak dipengaruhi oleh mekanisme jalur kredit. Kedua, terbukti bahwa kebijakan moneter kontraktif akan lebih berdampak kepada perusahaan kecil yang memiliki akses terhadap pembiayaan dibandingkan dengan perusahaan besar.

TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

Dalam keyakinan banyak orang selama ini, kebijakan moneter akan memiliki pengaruh langsung terhadap besaran-besaran keuangan seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham, penghimpunan dana perbankan, dan penyaluran kredit/pembiayaan bank. Sementara di sektor riil, kebijakan moneter memiliki pengaruh kepada kegiatan konsumsi, investasi, ekspor impor, output dan inflasi yang menjadi sasaran akhir kebijakan moneter (KBI Surabaya, 2007). Transmisi kebijakan moneter terhadap perbankan bekerja melalui transmisi saluran suku bunga sebagaimana yang dimuat pada Warjiyo dan Agung (2004) disajikan pada Gambar 2.

MODEL LOANABLE FUNDS

Model *loanable funds* merupakan analogi dari kurva permintaan dan penawaran kredit. Kurva permintaan menunjukkan permintaan kredit oleh *borrowers*, sedangkan kurva penawaran menunjukkan penawaran kredit dari para *lenders*. Dalam model ini diasumsikan hanya ada satu suku bunga yang dijadikan *proxy* bagi semua suku bunga. Asumsi kedua dalam model ini adalah, chanel kredit berjalan optimal dalam mentransmisikan kebijakan moneter sehingga bank sentral dapat mempengaruhi secara langsung permintaan dan penawaran kredit.



Gambar 2. Mekanisme Transmisi Saluran Suku Bunga

CREDIT CRUNCH VS CREDIT SLOWDOWN

Penurunan dalam kuantitas kredit dapat disebabkan oleh permintaan dan penawaran kredit. Penurunan kuantitas kredit yang disebabkan oleh sisi suplai atau merujuk kepada pengurangan dalam ketersediaan penawaran kredit lazim disebut *credit crunch*. Pazarbasioglu, (1996), mendefinisikan *credit crunch*, sebagai penurunan penawaran kredit akibat menurunnya kemauan bank-bank untuk memberikan pinjaman, tanpa diikuti oleh kenaikan suku bunga pinjaman. Namun demikian terdapat bentuk lain dari *credit crunch* yaitu *credit rationing* yang seringkali berkorelasi dengan fenomena *flight to quality*. *Credit rationing* merupakan kondisi di mana bank membatasi penawaran kredit meskipun bank memiliki dana berlebih untuk dipinjamkan. Menurut Ding, Domac, dan Ferri (1998), penawaran kredit ditransmisikan melalui jalur *balance sheet* dan *lending channel*. Pada umumnya *credit crunch* disebabkan oleh keengganan *lenders* untuk menyalurkan dana kepada *borrowers* yang seringkali berujung kepada keengganan calon debitur meminjam dana bank. Dalam kasus demikian sangat sulit untuk menjustifikasi apakah penurunan kredit disebabkan oleh faktor permintaan atau penawaran.

Penyebab lain dari penurunan kredit adalah kombinasi faktor permintaan dan penawaran. Fenomena ini dikenal dengan terminologi *credit slowdown*. Hasil studi Hisada (2004) menemukan bahwa ada tiga hal pokok penyebab *credit slowdown*, yaitu: kurangnya permodalan bank, tingginya risiko dan biaya kredit, adanya risiko pasar, serta adanya risiko likuiditas dan risiko sistemik

DISINTERMEDIASI PERBANKAN

Sampai dengan awal tahun 90-an, penyebab disintermediasi perbankan belum dapat diketahui secara pasti. Berbagai hipotesis telah dikemukakan antara lain melemahnya pertumbuhan ekonomi, penurunan kredit komersial dalam jangka panjang dan lemahnya neraca bank-bank milik pemerintah (Lown dan Peristiani, 1996). Beberapa studi bahkan menyimpulkan bahwa melemahnya ekspansi kredit disebabkan karena adanya penerapan *best practice* seperti *Basel Accord* yang memperkenalkan aturan mengenai permodalan yang berbasis risiko dan kecukupan *leverage ratio* (Breedan dan Isaac 1992; Peek dan Rosengen, 1993; Baer dan McElravey, 1993). Dengan model GMM Arelano Bond, Gambacorta dan Mistrulli (2004) menemukan bahwa di Italia terjadi *capital shock* berupa aturan bahwa posisi rasio *solevency* harus lebih dari 8% membawa implikasi penurunan *lending* sebesar 20% setelah 2 tahun.

Pengalaman serupa terjadi di Inggris pada masa resesi 1990-1991. Banyak pihak menyatakan bahwa penurunan *lending* pada masa tersebut disebabkan oleh *credit crunch*. Namun berdasarkan penelitian Peek dan Rosengren (1995) menunjukkan bahwa penurunan *lending* tersebut terjadi akibat bank-bank bermodal kecil gagal untuk memenuhi persyaratan modal minimum sehingga terjadi penurunan kredit.

Untuk kasus Indonesia, studi yang dilakukan oleh Agung, et al (2001) menyimpulkan bahwa penurunan kredit di Indonesia adalah *credit crunch* sebagai konsekuensi dari resesi. Dalam penelitian tersebut model penawaran kredit ditentukan oleh kapasitas kredit, tingkat suku bunga, rasio modal terhadap aset dan *non*

PERBANKAN

performing loans. Sementara permintaan kredit ditentukan oleh GDP riil dan suku bunga kredit. Sementara itu Hutapea (2007) menyimpulkan penurunan kredit di Indonesia paska krisis ekonomi 1997 lebih disebabkan oleh kurangnya permintaan dibandingkan konstrain suplai. Variabel-variabel yang digunakan untuk *long run credit demand*, antara lain, suku bunga kredit riil, GDP riil, dan *foreign exchange*. Sementara *long run credit supply*, adalah suku bunga kredit riil, kapasitas *lending bank* riil, tingkat bunga acuan, dan *foreign exchange*.

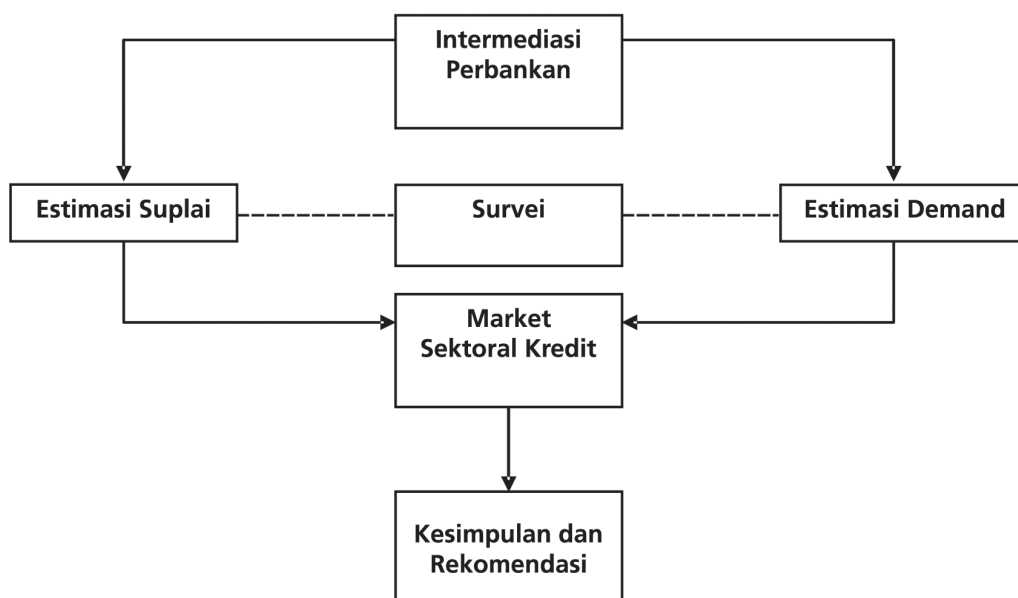
METODE

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder digunakan untuk mengestimasi fungsi permintaan dan penawaran kredit serta untuk memplot analisis *revealed credit worthiness*. Sedangkan data primer digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari perbankan mengenai hambatan-hambatan intermediasi perbankan melalui proses survei.

Data sekunder untuk mengestimasi merupakan data panel (gabungan data time series dan data cross sections) pada jangka waktu tahun 2002 hingga tahun 2007 di delapan daerah kota/kabupaten di wilayah kerja KBI Malang. Sementara data untuk plot *revealed credit worthiness* menggunakan data pada posisi akhir tahun 2007. Data-data sekunder diperoleh dari Laporan Bank Umum, Laporan BPR, BPS, dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia serta Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan tiga tahap. Pertama adalah analisis permintaan dan penawaran kredit perbankan yang dilakukan dengan penyusunan model ekonometrik. Kedua adalah identifikasi kendala-kendala intermediasi perbankan yang dilakukan melalui analisis deskriptif data primer dan hasil survei. Atas dasar kondisi yang ada, dengan tujuan memperoleh analisis kelayakan kredit sektoral perbankan serta untuk memperoleh gambaran strategi peningkatan ekspansi perbankan dilakukan analisis *revealed credit worthiness*.



Gambar 3. Kerangka Analisis Penelitian

Analisis Supply and Demand Kredit Perbankan dan Spesifikasi Model

Analisis *supply* dan *demand* digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi disintermediasi perbankan, dengan asumsi bahwa penyaluran kredit tidak selalu dalam kondisi ekuilibrium permintaan dan penawaran kredit maka perkembangan kredit dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$L_t = \min (L_t^D, L_t^S)$$

Jika $L_t^D > L_t^S$ maka terjadinya penurunan penyaluran kredit disebabkan oleh penawaran kredit dan sebaliknya jika $L_t^D < L_t^S$ maka penurunan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan permintaan kredit.

Model umum penawaran kredit (L_t^S)

$$L_t^S = \alpha_0 + \alpha_1 \text{kap} + \alpha_2 \text{RBI} + \alpha_3 \text{risk} + \epsilon t$$

L_t^S = total penyaluran kredit

Kap = Kapasitas kredit

RBI = tingkat bunga acuan

risk = tingkat risiko

ϵt = error term

Secara teoritis antara variabel-variabel di atas memiliki hubungan: kapasitas kredit memiliki hubungan positif dengan penawaran kredit, suku bunga memiliki hubungan positif dengan penawaran kredit, dan tingkat risiko memiliki hubungan negatif dengan penawaran kredit Model umum permintaan kredit (L_t^D)

$$L_t^D = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{RBI} + \beta_3 \text{Infl} + \epsilon t$$

L_t^D = Total Kredit

PDRB = Product Domestik Regional Brutto

RBI = tingkat bunga acuan

Infl = laju inflasi

ϵt = error term

Secara teoritis antara variabel-variabel di atas memiliki hubungan: tingkat pendapatan memiliki hubungan positif dengan permintaan kredit, tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif

dengan permintaan kredit, dan inflasi memiliki hubungan negatif dengan permintaan kredit.

Analisis Revealed Credit Worthiness

Analisis *revealed credit worthiness* digunakan untuk memetakan permasalahan disintermediasi kredit baik secara sektoral maupun regional. Analisis ini juga merupakan alat untuk menentukan sektor atau wilayah yang potensial untuk penyaluran kredit. Prinsip analisis *revealed credit worthiness* relatif sama dengan analisis SWOT, yaitu membagi kuadran atas dasar kekuatan/kelemahan relatif internal dan kekuatan/kelemahan terhadap eksternal.

Pemetaan *revealed credit worthiness* merupakan perbandingan relatif antara satu sektor ekonomi dengan PDRB sektor tertentu terhadap sektor tertentu di level region di atasnya serta perbandingan relatif sektor tertentu dengan PDRB sektor tertentu terhadap perbandingan relatif total kredit dengan PDRB. Secara matematis metode ini didefinisikan sebagai berikut:

$$RCW_r = A - B$$

$$RCW_s = A - C$$

Dimana :

RCW_r adalah *revealed creditworthiness* Regional. Nilai A yang lebih rendah dari nilai B menunjukkan bahwa sektor tertentu di suatu daerah mengalami permasalahan regional sehingga penyaluran kredit pada sektor tertentu menjadi tidak optimal secara relatif dibandingkan dengan di daerah lain.

RCW_s adalah *revealed creditworthiness* Sektoral. Nilai A yang lebih rendah dari nilai C menunjukkan bahwa sektor tertentu mengalami permasalahan sektoral sehingga penyaluran kredit sektor tertentu lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya.

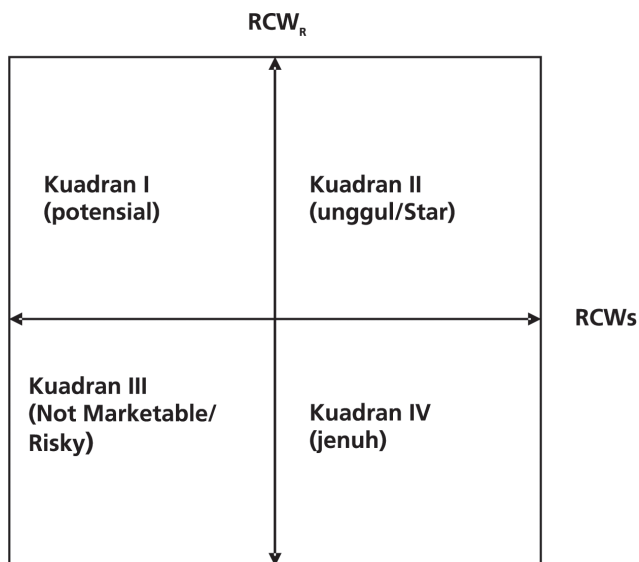
A adalah (rasio kredit sektor i di kota/kab terhadap PDRB sektor tertentu)

B adalah (rasio kredit sektor i nasional atau propinsi per sektor PDB atau PDRB propinsi)

PERBANKAN ■■■■■

C adalah (rasio total kredit kota/kab terhadap PDRB kota/kab).

Dalam bentuk diagram peta *revealed credit worthiness* dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Revealed Credit Worthiness

Keterangan:

- RCWS negatif menunjukkan terdapat permasalahan pada sektor tertentu sehingga bank enggan menyalurkan kredit.
- RCWR negatif menjelaskan terjadinya permasalahan regional sektor tertentu dibandingkan dengan daerah-daerah lain atau dapat dikatakan sektor tersebut bukanlah sektor yang secara relatif unggul/ layak dibandingkan daerah lain.
- Kuadran I, memiliki nilai RCWS negatif dan RCWR positif. Atau dapat dikatakan bahwa secara internal sektor tertentu memiliki permasalahan namun dibandingkan dengan eksternal relatif lebih unggul. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor tersebut memiliki **potensi/peluang** untuk peningkatan penyaluran kredit dengan meminimalkan penghambat-penghambat internal.

- Kuadran II, adalah daerah dimana baik RCWr maupun RCWs bernilai positif atau dapat diartikan bahwa sektor tertentu tidak mengalami permasalahan yang signifikan dalam penyaluran kredit, dengan demikian dapat dikatakan sektor tertentu merupakan sektor yang **unggul** ditinjau dari sisi perkreditan.
- Kuadran III, RCWr negatif dan RCWs negatif menunjukkan bahwa sektor tertentu mengalami permasalahan baik secara relatif internal maupun eksternal. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang memiliki risiko kredit tertinggi.
- Kuadran IV, RCWs positif RCWr negatif. Secara relatif internal terhadap sektor lain kredit sektor tertentu dominan namun dibandingkan dengan penyaluran kredit sektor yang sama di daerah lain relatif kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit kepada sektor tertentu cenderung mengalami **kejenuhan**.

HASIL

Analisis Permintaan dan Penawaran Kredit Wilayah Kerja KBI Malang

Analisis ini digunakan untuk mengestimasi dan mengidentifikasi faktor-faktor permintaan dan penawaran kredit di wilayah kerja KBI Malang. Sehingga tingkat kredit aktual dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$L_t = \min(L_t^D, L_t^S)$$

Jika $L_t^D > L_t^S$ maka terjadinya penurunan penyaluran kredit disebabkan oleh penawaran kredit dan sebaliknya jika $L_t^D < L_t^S$ maka penurunan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan permintaan kredit. Hasil estimasi permintaan dan penawaran kredit di wilayah kerja KBI Malang menghasilkan hasil estimasi sebagai berikut:

$$L_t^s = 4.44 + 0.46 L_{kap}^* - 0.006 RBI + 0.27 risk^* + \epsilon_t$$

(4.673) (4.155) (0.285) (3.794)

$R^2 = 0.96$

$Adj R^2 = 0.95$

$F\text{-stat} = 135.99$

$$L_t^D = -6.66 + 1.633LPDRB^* + 0.004RBI - 1.265Inf^* + \epsilon_t$$

(5.295) (34.203) (0.319) (4.507)

$R^2 = 0.98$

$Adj R^2 = 0.98$

$F\text{-stat} = 422$

Catatan: *significant at 0.01, 0.05 and 0.10 level respectively

Model estimasi suplai kredit menunjukkan bahwa dari variabel-variabel kapasitas kredit, tingkat bunga acuan, dan risiko kredit (laju NPL), hanya kapasitas kredit dan tingkat risiko (NPL) yang secara parsial mempengaruhi suplai kredit perbankan. Sementara tingkat suku bunga acuan secara parsial tidak signifikan mempengaruhi penawaran kredit perbankan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Hutapea (2007) yang menghasilkan kesimpulan bahwa suku bunga acuan bukan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi penawaran kredit. Walaupun demikian secara bersama-sama variabel-variabel kapasitas kredit, suku bunga acuan, dan tingkat NPL mampu menjelaskan variasi penawaran kredit di wilayah kerja KBI Malang. Berdasarkan tingkat respon penawaran kredit terhadap perubahan variabel independen, hasil estimasi menunjukkan hasil semua nilai koefisien elastisitas/sensitivitas berada di bawah angka 1 yang menunjukkan tidak sensitifnya penawaran kredit terhadap perubahan kapasitas kredit, tingkat bunga, dan risiko. Hal demikian dapat terjadi mengingat target-target kredit lebih sering ditetapkan oleh kantor pusat bank dibandingkan faktor-faktor penawaran kredit. Respon penawaran kredit tertinggi disebabkan oleh

perubahan kapasitas kredit. Peningkatan 1% kapasitas kredit melalui penghimpunan dana pihak ketiga akan meningkatkan penawaran kredit 0.46% walaupun demikian angka ini menggambarkan relatif tidak elastisnya penawaran kredit terhadap peningkatan kapasitas kredit. Demikian juga dengan perubahan suku bunga acuan, tingkat sensitivitas penawaran kredit relatif rendah yang dicerminkan dengan angka koefisien sebesar 0.006. Dengan demikian peningkatan suku bunga acuan 25 basis poin hanya akan memberi efek penurunan penawaran kredit sebesar 0.015%. Arah sensitivitas yang berbeda dengan hipotesis terjadi pada peningkatan risiko yang dicerminkan oleh laju kredit non-perform. Arah hubungan yang terjadi pada koefisien NPL menunjukkan tanda positif. Fenomena ini menggambarkan adanya kecenderungan perbankan di wilayah kerja KBI Malang untuk meningkatkan laju pertumbuhan kredit sebagai upaya jangka pendek untuk meredam pertumbuhan rasio NPL disamping dalam jangka panjang melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit bermasalah.

Sementara dalam model estimasi permintaan kredit, didapat hasil estimasi yang menyatakan secara parsial variabel-variabel PDRB dan inflasi mempengaruhi secara signifikan permintaan kredit di wilayah kerja KBI Malang sedangkan variabel suku bunga acuan tidak secara signifikan mempengaruhi permintaan kredit. Hasil ini pun sejalan dengan penelitian Agung *et.al.*, (2001) dan Hutapea (2007) yang menghasilkan kesimpulan bahwa suku bunga bukanlah merupakan konstrain dari pelaku bisnis dan masyarakat untuk meminta kredit dari bank. Walaupun demikian secara bersama-sama variabel-variabel di atas mampu menjelaskan variasi permintaan kredit di wilayah kerja KBI Malang. Dalam model estimasi permintaan, seluruh variabel independen menunjukkan arah sesuai dengan hipotesis kecuali koefisien suku bunga acuan. Arah positif koefisien suku bunga acuan

PERBANKAN

menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan perilaku ekspektasi dan *hedging* masyarakat dan bisnis terhadap sinyal peningkatan suku bunga acuan dengan melakukan pembelian aset melalui kredit (hasil konfirmasi beberapa bank menunjukkan pada saat terjadi *shock* tingkat bunga atau inflasi cenderung terjadi permintaan pembiayaan khususnya KPR). Berdasarkan tingkat respon terhadap perubahan variabel independen, tingkat sensitivitas tertinggi terjadi akibat perubahan pendapatan yakni sebesar 1.633 atau relatif elastisnya permintaan kredit terhadap peningkatan output. Angka ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan 1% PDRB akan meningkatkan permintaan kredit 1.63%. Sementara peningkatan 25 basis poin hanya memberikan efek peningkatan 0.001% permintaan kredit. Sedangkan peningkatan 1% laju inflasi akan menurunkan 1.3% permintaan kredit.

Berdasarkan model estimasi tersebut, permintaan kredit cenderung mengalami peningkatan terkecuali pada periode 2005-2006, sejalan dengan kondisi makro yang kurang kondusif, namun *trend* peningkatan permintaan kredit kembali meningkat pada periode 2006-2007 sementara dari sisi suplai relatif pada perkembangan yang stabil. Walaupun demikian

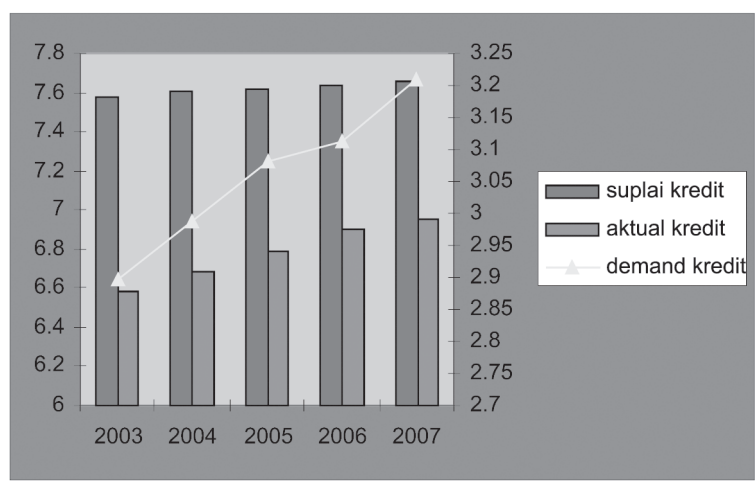
selama periode tersebut pada setiap periode menunjukkan terjadinya *excess supply* kredit. Dengan demikian fenomena tidak optimalnya penyaluran kredit di wilayah kerja KBI Malang lebih merupakan fenomena *slowdown* dibandingkan dengan adanya fenomena *credit crunch*.

Analisis Revealed Credit Worthiness

Model estimasi permintaan dan penawaran kredit di wilayah kerja KBI Malang memberikan satu kesimpulan bahwa tidak optimalnya penyaluran kredit di wilayah kerja KBI Malang lebih disebabkan oleh minimnya permintaan kredit (*excess supply*). Lebih lanjut, pertanyaannya adalah pada sektor-sektor apa dan di daerah mana saja permasalahan ketidakefektifan penyaluran kredit terjadi. Untuk menjawab hal ini digunakan *tools* kuadran *revealed credit worthiness*. Selain untuk tujuan memetakan permasalahan tidak optimalnya penyaluran kredit baik secara sektoral maupun regional. Analisis ini juga merupakan alat untuk menentukan sektor atau wilayah yang potensial untuk penyaluran kredit.

Sektor Pertanian

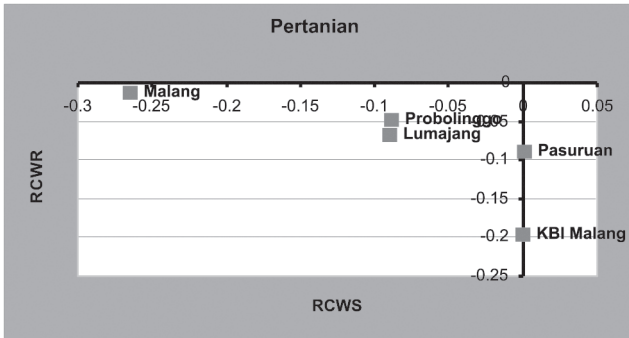
Plot revealed credit worthiness sektor pertanian pada bank umum menunjukkan bahwa



Sumber : Hasil Estimasi, 2008.

Gambar 5. Perbandingan antara Estimasi Penawaran dan Permintaan Kredit di Wilayah Kerja KBI Malang

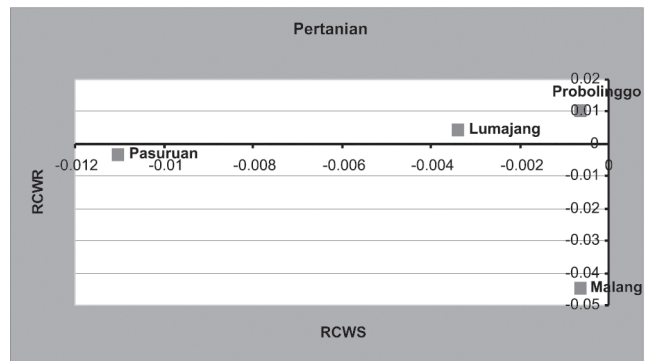
semua daerah berada pada kuartal III, yang mengindikasikan baik secara relatif dibandingkan dengan penyaluran kredit sektor-sektor lainnya di daerah tersebut maupun relatif I terhadap penyaluran kredit sektor yang sama rata-rata nasional, penyaluran kredit sektor pertanian di wilayah kerja KBI Malang tidak *marketable* (Gambar 6).



Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 6. Peta Revealed Credit Worthiness Bank Umum Sektor Pertanian

Lain halnya dengan penyaluran kredit pertanian oleh BPR. Hasil plot menunjukkan bahwa di daerah Pasuruan dan Probolinggo merupakan sektor yang potensial untuk penyaluran kredit bagi BPR. Penyaluran kredit pada sektor ini akan memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun bagi BPR. Sementara di daerah lainnya, Pasuruan dan Malang, dengan karakteristik perekonomian yang berbeda dengan Lumajang dan Probolinggo didapat hasil plot kedua daerah tersebut di kuadran IV atau disimpulkan di Malang dan Pasuruan, sektor pertanian pun bukan merupakan segmen yang *marketable* bagi penyaluran kredit BPR (Gambar 7).

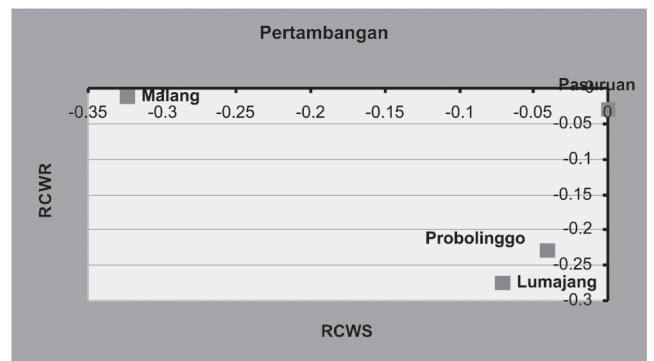


Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 7. Peta Revealed Credit Worthiness BPR Sektor Pertanian

Sektor Pertambangan

Sama halnya dengan sektor pertanian, hasil plot menunjukkan penyaluran kredit sektor pertambangan di seluruh daerah berada pada kuadran III. Dengan kata lain penyaluran kredit pada sektor pertambangan di wilayah kerja KBI Malang secara rata-rata tidak memberikan manfaat yang optimal baik bagi perbankan maupun perekonomian wilayah atau penyaluran kredit pada sektor pertambangan bukan merupakan pasar yang tepat bagi bank-bank umum di wilayah kerja KBI Malang (Gambar 8).

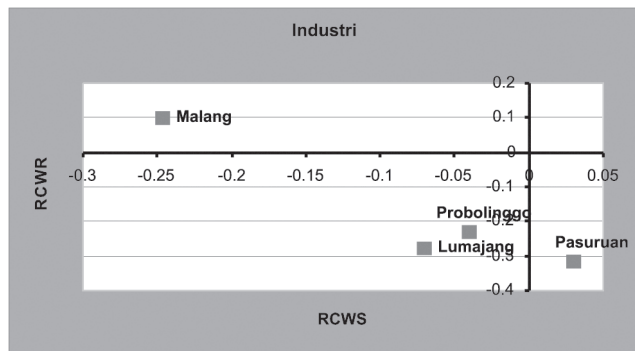


Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 8. Peta Revealed Credit Worthiness Bank Umum Sektor Pertambangan

Sektor Industri

Pada sektor industri, hasil *plot revealed creditworthiness* menghasilkan kesimpulan bahwa penyaluran kredit sektor industri potensial disalurkan oleh bank-bank umum wilayah Malang ditunjukkan pada Gambar 9.



Sumber: Hasil estimasi, 2008.

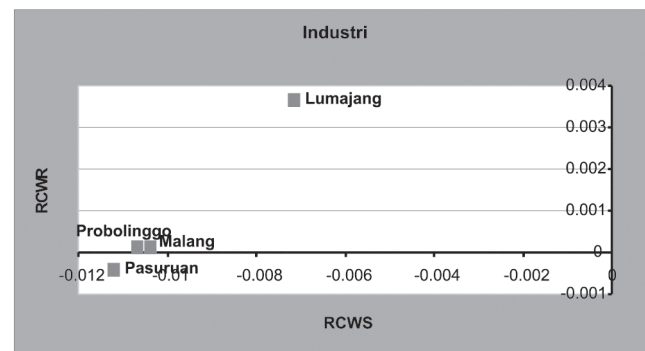
Gambar 9. Peta Revealed Credit Worthiness Bank Umum Sektor Industri

Secara relatif terhadap total kredit di Malang, *share* kredit industri relatif masih rendah namun sektor ini memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian. Atau terdapat indikasi sumber pembiayaan industri di Malang tidak bersumber dari dana kredit bank umum di Malang. Dengan demikian masih terdapat potensi untuk memaksimalkan pertumbuhan kredit di sektor industri.

Lain halnya dengan wilayah Pasuruan, penyaluran kredit sektor industri mengalami kondisi yang cenderung mengalami kejenuhan. *Share* kredit sektor ini di Pasuruan relatif besar namun dibandingkan menurut rata-rata nasional peranan kredit sektor ini terhadap PDRB relatif minimal, hal ini dapat menjadi indikasi adanya kecenderungan kejenuhan sektor industri di Pasuruan. Sementara di daerah Probolinggo dan Lumajang, menghasilkan plot sektor industri yang berada di kuadran III atau menghasilkan kesimpulan sektor industri bukan merupakan

sektor yang *marketable* bagi penyaluran kredit bank umum.

Lain halnya dengan penyaluran kredit industri BPR. Peluang pembiayaan industri (baca industri dalam skala mikro, kecil), terbuka di wilayah-wilayah Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Wilayah-wilayah ini memiliki relatif banyak industri-industri yang layak untuk dibiayai oleh segmen BPR namun secara relatif pembiayaan di sektor ini masih minimal disalurkan oleh BPR. Sementara untuk pembiayaan industri di Pasuruan oleh BPR, hasil plot menunjukkan hasil penyaluran kredit sektor industri oleh BPR tidak lagi *marketable* (Gambar 10).



Sumber: Hasil estimasi, 2008.

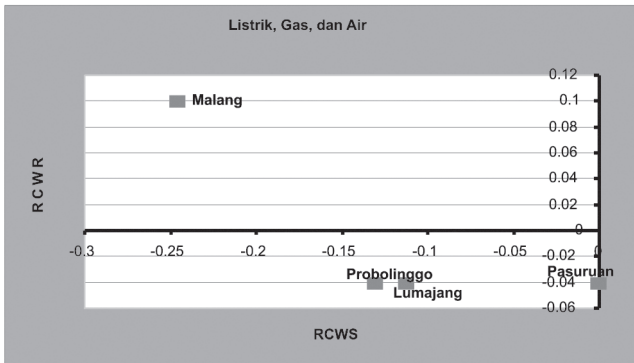
Gambar 10. Peta Revealed Credit Worthiness BPR Sektor Industri

Sektor Listrik, Gas, dan Air

Secara relatif, kontribusi sektor listrik, gas, dan air di Malang terhadap PDRB relatif tinggi, namun *share* pembiayaan sektor ini terhadap PDRB masih belum terlalu optimal. Atau dengan kata lain sumber pembiayaan sektor listrik gas dan air di wilayah Malang tidak bersumber dari dana perbankan. Berdasarkan fakta ini, penyaluran kredit oleh bank umum untuk sektor di atas masih memiliki peluang/potensi. Sementara kondisi sebaliknya dengan wilayah-wilayah lain. Hasil plot menunjukkan bahwa baik secara relatif internal maupun eksternal, pembiayaan bagi sektor ini oleh bank umum tidak cukup *marketable* (Gambar 11).

Sektor Perdagangan

Plot *revealed credit worthiness* menghasilkan kesimpulan bahwa penyaluran kredit sektor perdagangan di wilayah Malang merupakan sektor yang mapan/unggul dalam penyaluran kredit bank umum baik dipandang secara sektoral maupun relatif terhadap rata-rata nasional. Kondisi sebaliknya dengan Lumajang, sektor ini merupakan sektor yang tidak *marketable* bagi penyaluran kredit bank umum (Gambar 13).

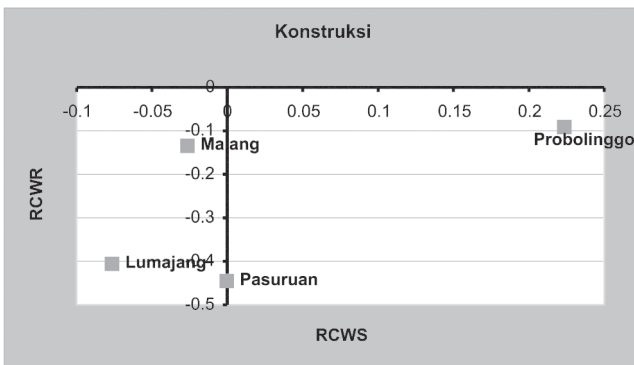


Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 11. Peta Revealed Credit Worthiness Bank Umum Sektor Listrik, Gas, dan Air

Sektor Konstruksi

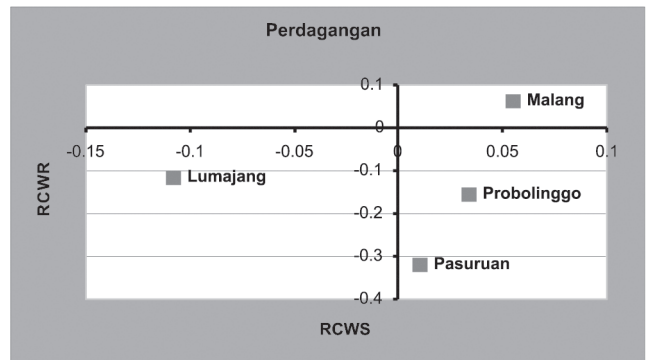
Hasil plot menghasilkan kesimpulan, penyaluran kredit/pembiayaan sektor konstruksi di wilayah Malang, Pasuruan, dan Lumajang relatif tidak *marketable* (Gambar 12).



Sumber: Hasil estimasi, 2008.

Gambar 12. Peta Revealed Credit Worthiness Bank Umum Sektor Konstruksi

Sementara di wilayah Probolinggo, penyaluran kredit di sektor konstruksi berada di kuadran IV, yang mencerminkan bahwa walaupun penyaluran kredit/pembiayaan di sektor ini namun secara ekonomi sektor ini kurang memberikan kontribusi bagi perekonomian. Dengan demikian terdapat indikasi penyaluran kredit/pembiayaan di sektor ini potensial mengalami kejenuhan.

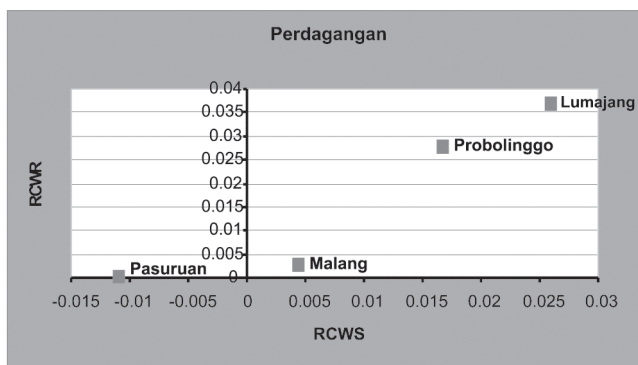


Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 13. Peta Revealed Credit Worthiness Bank Umum Sektor Perdagangan

Sementara untuk daerah Probolinggo dan Pasuruan, sektor ini merupakan sektor yang dominan dalam penyaluran kredit tetapi secara relatif terhadap rata-rata kontribusi penyaluran kredit nasional kepada PDRB relatif rendah. Dengan demikian terdapat indikasi sektor ini sedang mengalami kejenuhan penyaluran kredit bank umum.

Untuk penyaluran kredit sektor perdagangan oleh BPR, segmen kredit sektor tersebut potensial dilakukan di wilayah Pasuruan. Sedangkan di Malang, Probolinggo, dan Lumajang penyaluran di sektor ini oleh BPR relatif unggul/mapan dibandingkan rata-rata nasional (Gambar 14).

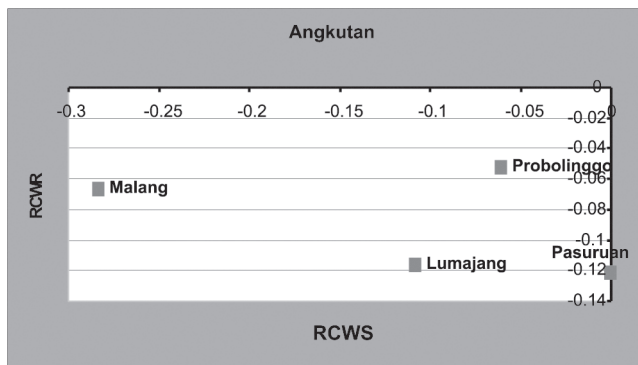


Sumber: Hasil estimasi, 2008.

Gambar 14. Peta Revealed Credit Worthiness BPR Sektor Perdagangan

Sektor Angkutan

Di semua daerah (Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang) hasil estimasi *revealed credit worthiness* menghasilkan kesimpulan bahwa penyaluran kredit pada sektor angkutan relatif tidak *marketable* bagi penyaluran kredit bank umum baik secara sektoral maupun dibandingkan daerah lain (Gambar 15).



Sumber : Hasil estimasi, 2008.

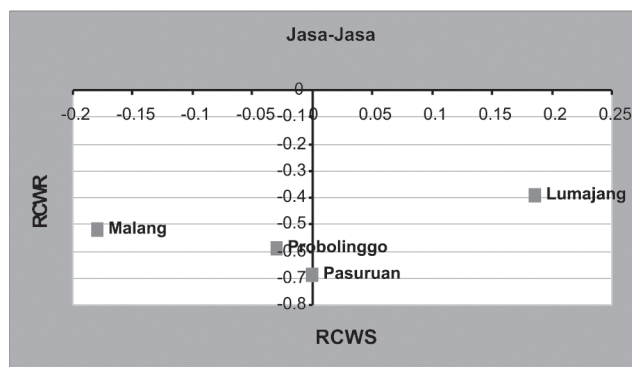
Gambar 15. Peta Revealed Credit Worthiness Bank Umum Sektor Angkutan

Hal ini bisa dipahami mengingat sektor ini merupakan sektor yang *highly regulated* dan rentan terhadap issue-issue makroekonomi. Sebagai gambaran, dampak dari kenaikan BBM dan suku cadang pada bulan Oktober 2005 dan Mei 2008 menyebabkan terjadinya pengurangan

armada yang potensial menimbulkan permasalahan kredit.

Sektor Jasa-jasa

Pembiayaan sektor jasa-jasa merupakan sektor yang terkait dengan pembiayaan kepada jasa kesehatan, hiburan, sarana dan prasarana (pasar, sekolah), dan jasa-jasa lainnya. Plot estimasi terhadap penyaluran kredit bank umum menghasilkan hasil plot pada Gambar 16.

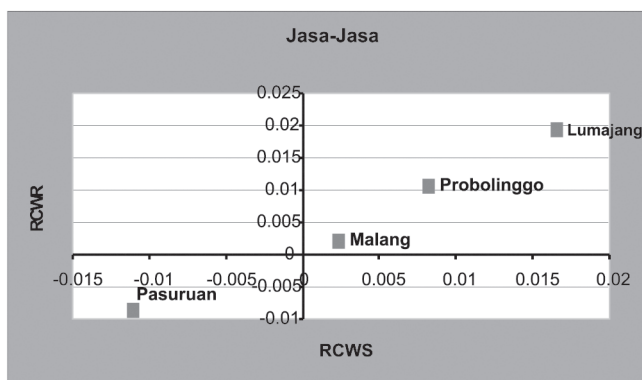


Sumber: Hasil estimasi, 2008.

Gambar 16. Peta Revealed Credit Worthiness Bank Umum Sektor Jasa-jasa

Penyaluran kredit oleh bank umum pada sektor ini di wilayah Malang, Probolinggo, dan Pasuruan berada di kuadran III. Menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada sektor tersebut tidak cukup *marketable*. Hal demikian dapat dipahami mengingat mapannya sarana dan prasarana di ketiga daerah tersebut. Berbeda dengan Lumajang, plot analisis menghasilkan kesimpulan adanya kecenderungan mulai jenuhnya penyaluran kredit di sektor jasa di wilayah Lumajang.

Untuk BPR, tidak terdapat permasalahan yang berarti bagi penyaluran kredit sektor jasa-jasa penunjang usaha di daerah Malang, Probolinggo, dan Lumajang. Sedangkan di Pasuruan adanya kecenderungan bahwa pasar sektor jasa tidak lagi *marketable* bagi BPR (Gambar 17).

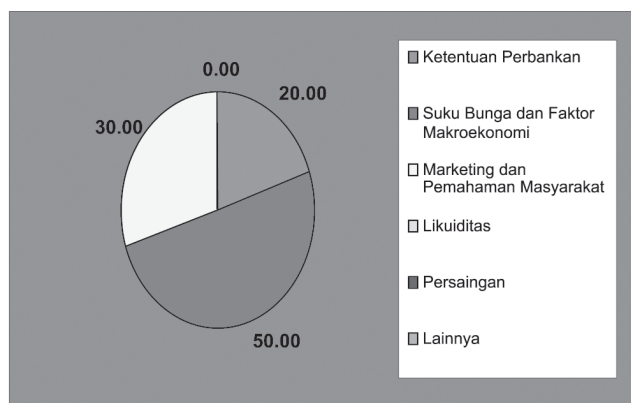


Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 17. Peta Revealed Credit Worthiness BPR Sektor Jasa-jasa

Analisis Deskriptif

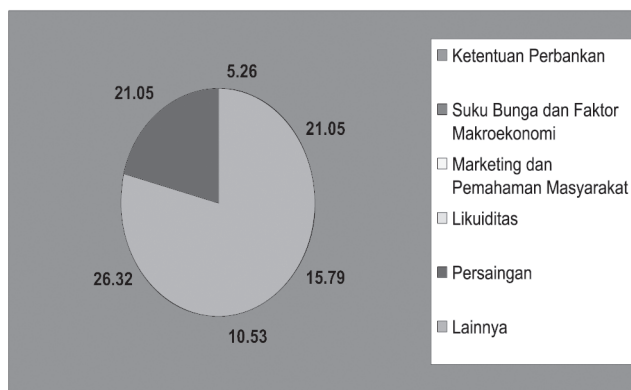
Analisis deskriptif melalui survei untuk mengkonfirmasi mengenai eksess likuiditas perbankan. Hasil survei yang dilakukan terhadap seluruh perbankan di wilayah kerja KBI Malang menghasilkan beberapa kesimpulan: (1) Alasan utama peningkatan volume ekspansi kredit perbankan dari sisi permintaan didominasi oleh alasan prospek usaha yang meningkat dan tingkat suku bunga sementara dari sisi penawaran bank disebabkan oleh faktor likuiditas bank serta ekspektasi risiko kredit yang menurun. (2) Menyikapi permasalahan sektoral ekonomi, perbankan baik bank umum maupun BPR cenderung untuk menghindari pemberian kredit kepada sektor-sektor yang potensial mengalami permasalahan kredit seperti perkayuan, pertanian, garment dan tekstil, serta konstruksi. (3) Menurut persepsi dan analisis *supply* dan *demand*, dianggap bahwa faktor-faktor yang menghambat proses intermediasi perbankan adalah faktor-faktor ketentuan dan implementasi penerapan *prudential banking*, faktor suku bunga dan ekonomi makro, *marketing* dan pemahaman masyarakat akan produk perbankan, keuangan internal bank (likuiditas bank), serta faktor persaingan dengan sesama bank ataupun dengan lembaga keuangan lain (Gambar 18).



Sumber : Bank Umum di Wilker KBI Malang, 2008.

Gambar 18. Penghambat Intermediasi Menurut Persepsi Bank Umum di Wilayah Kerja KBI Malang

Untuk kategori bank umum, mayoritas bank menyatakan bahwa faktor utama penghambat intermediasi bank adalah faktor makro ekonomi (50%), diikuti dengan faktor masyarakat yang belum terlalu bank minded (30%), dan permasalahan ketentuan perbankan dan implementasi penerapan *prudential banking* (20%).



Sumber: BPR di Wilker KBI Malang, 2008.

Gambar 19. Penghambat Intermediasi Menurut Persepsi BPR di Wilayah Kerja KBI Malang

Untuk bank umum permasalahan likuiditas tidak menjadi persoalan utama penghambat

intermediasi dikarenakan secara rata-rata kantor cabang bank umum di wilayah kerja KBI Malang mengalami excess likuiditas. Berbeda dengan bank umum, pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) justru lemahnya intermediasi BPR disebabkan oleh tingkat persaingan yang relatif tinggi baik dengan lembaga keuangan bank maupun dengan lembaga keuangan non bank (26%), diikuti oleh faktor ekonomi makro dan suku bunga (21%), faktor marketing dan pemahaman masyarakat akan produk bank (16%), serta faktor ketentuan perbankan dan implementasi penerapan *prudential banking* (5,3%) dalam Gambar 19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor permintaan dan penawaran kredit perbankan di wilayah kerja KBI Malang dengan menggunakan panel data. Hasil estimasi permintaan dan penawaran kredit di wilayah kerja KBI Malang menghasilkan kesimpulan bahwa permasalahan tidak optimalnya penyaluran kredit lebih disebabkan oleh lemahnya *demand* kredit untuk mengimbangi kemampuan pembiayaan perbankan.

Dari sisi permintaan kredit, respon permintaan kredit relatif tinggi terjadi akibat pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien respon sebesar 1.63%, atau pada setiap pertumbuhan perekonomian 1% akan menghasilkan pertumbuhan *demand* kredit sebesar 1.63%. Sementara untuk suku bunga, terdapat hasil yang konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan kesimpulan bahwa secara parsial tingkat suku bunga bukan merupakan konstrain dari permintaan kredit bisnis dan masyarakat. Seperti halnya dengan variabel pendapatan, respon permintaan kredit di wilayah

kerja KBI Malang juga relatif sensitif terhadap perubahan inflasi dengan koefisien sensitivitas sebesar 1.3% atau peningkatan 1% laju inflasi akan menurunkan permintaan kredit 1.3%. Secara bersama-sama variabel-variabel mampu menjelaskan 95% variasi permintaan kredit.

Sementara hasil estimasi suplai kredit menghasilkan kesimpulan bahwa variabel-variabel kapasitas kredit, tingkat bunga, dan tingkat NPL secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variasi penawaran kredit. Namun secara parsial hanya kapasitas kredit dan tingkat NPL yang memiliki pengaruh secara signifikan. Menurut tingkat respons, penawaran kredit relatif kurang sensitif terhadap perubahan-perubahan kapasitas kredit, tingkat bunga, dan risiko. Hal demikian dapat terjadi mengingat target-target kredit lebih sering ditetapkan oleh kantor pusat bank dibandingkan faktor-faktor penawaran kredit di daerah.

Menurut sektor ekonomi, beberapa penyaluran kredit bank umum mengalami permasalahan intermediasi akibat segmen kredit secara sektoral tidak *marketable*. Untuk sektor pertanian, pertambangan, dan angkutan, kondisi tidak *marketable* terjadi di seluruh kota dan kabupaten. Sektor industri, peluang pembiayaan/penyaluran kredit lebih besar dapat dilakukan perbankan Malang. Sedangkan untuk daerah Probolinggo dan Lumajang relatif tidak *marketable*. Sementara di Lumajang penyaluran kredit sektor industri cenderung mengalami kejenuhan penyaluran. Demikian pula dengan penyaluran kredit sektor listrik, gas, dan air masih potensial dilakukan oleh bank umum di Malang namun tidak *marketable* jika dilakukan bank-bank umum di Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Untuk sektor konstruksi penyaluran kredit oleh bank-bank umum di semua wilayah, kecuali Probolinggo tidak *marketable*. Di Probolinggo walaupun porsi penyaluran relatif besar namun telah mengalami kecenderungan jenuh. Jenis kredit perdagangan, di Malang

merupakan sektor yang mapan sehingga tidak ada permasalahan yang berarti dalam penyaluran kredit, tetapi berbeda dengan di Pasuruan dan Probolinggo, walaupun porsi penyaluran relatif besar tetapi cenderung mengalami kejenuhan penyaluran kredit. Sementara di Lumajang penyaluran kredit sektor ini tidak *marketable*. Untuk sektor jasa, penyaluran kredit relatif besar namun cenderung mengalami kejenuhan terjadi di wilayah Lumajang sementara di daerah lainnya justru tidak *marketable*.

Untuk penyaluran kredit sektoral oleh BPR, sektor pertanian merupakan sektor yang potensial dibiayai oleh BPR di wilayah Probolinggo dan Lumajang tetapi tidak *marketable* bagi daerah lainnya. Pada sektor industri potensi pembiayaan terdapat di semua daerah kecuali di Pasuruan. Sementara untuk sektor perdagangan potensi peningkatan penyaluran kredit terbuka bagi pembiayaan sektor perdagangan di Pasuruan, sedangkan di daerah lainnya tidak terdapat permasalahan berarti bagi penyaluran kredit sektor ini. Untuk jasa-jasa, tidak terdapat permasalahan yang berarti pada penyaluran kredit di Malang, Lumajang, dan Probolinggo sementara di Pasuruan penyaluran kredit BPR di sektor ini tidak *marketable*.

Menyikapi permasalahan sektoral ekonomi, perbankan baik bank umum maupun BPR cenderung untuk menghindari pemberian kredit kepada sektor-sektor yang potensial mengalami permasalahan kredit seperti perkayuan, pertanian, garment dan tekstil, serta konstruksi.

Saran

Mengingat setiap kantor cabang bank, kondisi daerah dan sektor-sektor ekonomi memiliki karakteristik tersendiri, agar dipahami bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat agregat dan ditafsirkan sebagai kecenderungan umum. Hasil estimasi yang memberikan kesimpulan bahwa disintermediasi perbankan wilayah kerja KBI Malang lebih

disebabkan oleh faktor permintaan kredit, maka rekomendasi utama yang dapat diberikan adalah pengupayaan peningkatan *demand for credit* melalui perbaikan kondisi sektor riil dan stabilisasi faktor makroekonomi. Sementara dari sisi moneter, pengendalian moneter dengan tujuan untuk mempengaruhi likuiditas perekonomian di daerah relatif tidak signifikan berkaitan.

Kelebihan penawaran juga merupakan implikasi dari sistem sentralisasi perbankan sehingga peningkatan kapasitas kredit, tingkat bunga dan faktor risiko tidak selalu berimplikasi langsung kepada pertumbuhan kredit. Walaupun demikian hal ini tetap diperlukan untuk tujuan-tujuan efisiensi perbankan tetapi dengan disertai keterlibatan kantor cabang bank yang lebih baik dalam hal penetapan target-target bisnis.

Mengingat bahwa transmisi kebijakan moneter tidak selalu berimplikasi langsung kepada perbankan daerah, diperlukan *further research* mengenai efektivitas transmisi kebijakan moneter di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Piter, A. & Suseno. 2003. Fungsi Intermediasi Perbankan di Daerah: Pengukuran dan Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *BEMP* (Maret).
- Agenor, P.R, Aizenman, J., & Hoffmaister, A. 2000. The Credit Crunch in East Asia : What Can Bank Excess Liquid Asset Tell Us. *Journal of International Money and Finance*, Vol.1.
- Agung, J. 2001. *Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis : Fakta, Penyebab, dan Implikasi Kebijakan*. Jakarta: Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
- Alamsyah, H. 2005. Banking Disintermediation and Its Implication for Monetary Policy: The Case of Indonesia. *BEMP* (Maret).

PERBANKAN ■■■■■

- Anonymous. 2007. *Intermediasi Perbankan : Kendala dan Solusi Penyelesaiannya*, Intercafe LPPM – IPB.
- Bernanke, Ben, S. & Blinder, A.S. 1992. The Federal Funds Rate and The Channel of Monetary Transmission. *American Economic Review*, Vol.82, No.4 (Sept), pp.901-921.
- Bernanke, Ben, S. & Lown, C.S. 1991. The Credit Crunch. *Brookings Papers on Economic Activity*, Vol.2, No.2, pp.205-247.
- Ding, W., Domac, I., & Ferry, G. 1998. Is There A Credit Crunch In East Asia? *Asia Pacific Journal of Economics and Business*.
- Gambacorta, L. & Mistrulli, P.E. 2004. Does Bank Capital Affect Lending Behavior? *Journal of Financial Intermediation*, Vol.13, No.4 (October), pp.436-457.
- Harmanta & Ekananda, M. 2005. Disintermediasi Fungsi Perbankan di Indonesia Paska Krisis 1997 : Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan dengan Model Disequilibrium. *BEMP* (Juni).
- Hutapea, E. G. 2007. Credit Downturn In The Aftermath of Indonesian Crisis 1997 Revisited: An Application of ARDL Bounds Testing Approach. *BEMP* (April).
- Lamberte, M.B. 1999. A Second Look at Credit Crunch: The Philippine Case. *Discussion Paper Series*, No.99. Philippine Institute for Development Studies.
- Lown, C.S & Peristiani, S. 1996. The Behavior of Consumer Loan Rates During 1990 Credit Slowdown. *Journal of Banking and Finance*, Vol.20, (December), pp.1673-1694.
- Maski, G. 2006. *Transmisi Kebijakan Moneter, Kajian Teoritis dan Empiris*. BPF-UNIBRAW.
- Pazarbasioglu, C. 1996. A Credit Crunch? A Case Study of Finland in The Aftermath of The Banking Crisis. *IMF Working Papers*, 96/125. International Monetary Fund.
- Peek, J. & Rosengren. 1995. Bank Regulator and The Credit Crunch. *Journal of Banking and Finance*, Vol.19, No.3-4 (June), pp.679-692.
- Stiglitz, J. & Greenwald, B. 2003. *Towards a New Paradigm For Monetary Economics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Warjiyo, P. & Agung, J. 2002. *Transmission Mechanisms of Monetary Policy in Indonesia*, Jakarta : Bank Indonesia.